

HUKUM ISLAM DAN TOLERANSI TASAWUF ATAS BUDAYA

Oleh: Fokky Fuad Wasitaatmadja*

ABSTRACT

Research on Islamic law and sufism become important due to the fact that sufism is forbidden legally because it is receptive value outside of Islam. Some Islamic scholars allow so long as not to contradict the rules of Islamic law. Because it needs to be studied in depth interaction with the method of Islamic self-approach method of man to God in the epistemology of Islam. The problem formulation in this research is how tolerance values of sufism in cultural development process? Furthermore how is the interaction of sufism and sharia in the process of cultural approach? The method used in this research is sociological method, while the theory used is the cultural legal theory. Research results show that: Firstly, tolerance of Islam through sufism has been widely accepted since the spread of islam at an early stage. Secondly, the interaction between Sufism and sharia is not contradictory where the application of sharia can be explained easily by using sufism methodology.

Keywords: Islamic law, sufism, culture.

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI).

Pendahuluan

Sufisme atau *tasawuf* merupakan sikap perilaku pengendalian diri melalui pengendalian hati hanya untuk Allah semata. Tasawuf bertujuan untuk menciptakan atau membentuk akhlaq mulia. Pelaku tasawuf berupaya untuk memperbaiki akhlaq dengan jalan berpaling dari kehidupan dunia. Fokus tasawuf berkaitan dengan amal-amal batin. Secara hukum dalil tentang pengolahan batin ini dapat merujuk pada Quran sebagai sumber tertinggi dalam hirarki Hukum Islam. Allah menjelaskan dalam Quran: *“Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi”* (Qs. Al-An’am: 151).

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa hendaknya manusia menjauhi perbuatan keji baik perbuatan tersebut tampak, maupun perbuatan tersebut tersembunyi. Perbuatan keji atau sifat jahat yang tersembunyi merupakan perbuatan yang tersimpan dalam hati dan jiwa setiap manusia. Allah menghendaki perbuatan yang tersembunyi menghilang dari ketersembunyiannya dalam hati manusia. Proses metode pembersihan hati ini menggunakan pendekatan tasawuf Islam.

Penelitian tentang Sufisme Islam dan budaya menjadi menarik setidaknya disebabkan oleh beberapa hal: Pertama, bahwa pendekatan sufisme dalam proses

beragam acapkali identik dengan penyimpangan dalam ajaran Islam. Pemahaman akan Islam yang dicoba dipersepsi dengan akal manusia ini menghasilkan beragam pemikiran akan Islam. Ulama berbeda pendapat dalam melihat fenomena tasawuf, sebagian menyatakan benar karena ia berasal dari ajaran-ajaran Islam, sebagian menyatakan terlarang secara hukum karena merupakan resepsi nilai di luar Islam, sebagian membolehkan selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Dalam hal ini maka perlu ditelaah secara mendalam interaksi Islam dengan metode-metode pendekatan diri seorang manusia kepada TuhanNya dalam ruang epistemologi Islam.

Kedua, bahwa pemahaman rakyat masyarakat terhadap Islam yang beragam baik melalui metode tasawuf maupun melalui metode syariah menghadirkan keragaman wacana dalam berIslam. Kaitan lebih jauh adalah hubungan dengan beragam budaya yang tersebar di dunia dan Nusantara khususnya. Budaya dunia dan juga Nusantara menghadirkan nilai-nilai spiritual Islam yang kental. Nilai-nilai ini tampaknya merupakan proses-proses interaksi dan internalisasi Sufisme Islam ke dalam budaya manusia. Disnilah perlunya didalami makna penting tasawuf Islam dalam proses pengembangan budaya.

Dari dua hal tersebut di atas, maka permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, adalah: Pertama, bagaimanakah toleransi nilai-nilai tasawuf dalam proses-proses pengembangan budaya? Kedua, bagaimanakah interaksi tasawuf dan syariah dalam proses-proses pendekatan budaya?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *sociolegal*. Dalam penelitian ini peneliti mencoba melihat bagaimana interaksi hukum, religi dan budaya untuk menjawab permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemahaman hukum, tasawuf, dan budaya.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori Budaya Hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman menjelaskan bahwa hukum dapat berjalan ketika ia didukung oleh tiga hal: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam penerimaan budaya hukum, maka hukum berjalan dengan baik ketika ia diterima oleh budaya yang berlaku pada kelompok-kelompok sosial yang ada.

Toleransi Tasawuf dan Interaksi Budaya

Buya Hamka menjelaskan bahwasanya Tasawuf atau sufisme berasal

dari jantung Islam sendiri. Hamka melihat bahwa adanya sebuah pendekatan filsafat yang cenderung hanya melihat pada dunia telah menjadikan keringnya jiwa umat Islam. Tasawuf atau sufisme hadir sebagai kendali jiwa, semata-mata mengharap ridha Allah. Tasawuf atau sufisme merupakan jalan tempuh ruhani yang mencoba meneladani Nabi Muhammad SAW itu sendiri (Hamka 2016:11-21). Proses meneladani Nabi Muhammad tercermin dalam ragam pemahaman secara religi, disinilah tasawuf berinteraksi secara dinamis dengan nilai budaya yang dihasilkan oleh proses-proses dinamis akal.

Ranah budaya merupakan ranah akal dinamis manusia, yang dengannya ia mampu mempertahankan dirinya, menciptakan peradaban-peradaban besar manusia sebagai bentuk eksistensi manusia. Islam merupakan agama langit yang turun dari Allah kepada manusia, akankah keduanya dapat bertemu dalam sebuah titik temu? Untuk itulah perlu dilihat secara normatif dan juga historis hubungan-hubungan antara Keislaman dan Keindonesiaan. Secara normatif berarti melihat pada sumber norma dasar Islam. Quran sebagai dasar dari terbentuknya sebuah dasar-dasar norma hukum manusia dalam bertingkah-laku. Quran diletakkan sebagai basis utama manusia bertindak dan berbuat, darinyalah dapat ditelusuri

interaksi religi dan budaya. Quran menjelaskan dalam sebuah ayat mengenai keragaman budaya: *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*. (Qs. al-Hujurat: 13)

Dalam dinamika ruang interaksi akal yang melahirkan budaya, serta perintah Allah dalam Quran tersebut tampak jelas sebuah titik temu antara religi agama dan budaya. Allah menciptakan manusia tidaklah tunggal. Manusia yang tercipta bukanlah manusia yang memahami sebuah ide-ide yang sama, melainkan keragaman dinamis. Manusia diciptakan dengan segenap komponen akalnya yang kemudian melahirkan nilai struktur budayanya. Allah-lah dan ayat tersebut yang bertindak selaku pencipta manusia dan peradabannya.

Tasawuf atau sufisme sendiri tidak sekedar diartikan sebagai sebuah konsep pengasingan diri terhadap kondisi lingkungan sosialnya, akan tetapi juga terlibat aktif dalam proses-proses dinamika sosial. Proses perlawanan terhadap

ketidakadilan sosial juga dilancarkan oleh kelompok-kelompok sufi. Perjuangan melawan kezaliman akan penjajahan di Asia yang pernah melanda. Ketika terjadi pemberontakan petani Banten pada tahun 1888, kelompok tarekat sufi Qadiriyyah memiliki peran dalam menggerakkan kesadaran sosial untuk melawan ketidakadilan kolonial di Banten. Kelompok tarekat Qadiriyyah ini mampu membangkitkan sikap revolusioner hingga berujung pada pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda (Kartodirdjo 2015: 180-184). Proses radikalisi kelompok tarekat ini muncul seiring dengan tumbuhnya praktik kolonialisme di wilayah-wilayah muslim. Beberapa rezim seperti Turki sempat melarang gerakan tarekat karena dianggap melawan proses-proses modernisasi Turki. Perlawanan terhadap gerakan tarekat dan sufi juga dilancarkan oleh pemikir Islam modernis yang menganggap bahwa tarekat sebagai bentuk kemunduran kaum Muslim dalam menghadapi Barat (Azra 2002, 377-397).

Pendekatan tasawuf ini begitu beragam ketika syariah menerapkan pendekatan yang seragam. Keduanya bukanlah saling bertentangan dan berhadapan tetapi bergerak dalam dinamika epistemologi yang berbeda. Dalam tasawuf peran guru Sufi begitu kuat, karena ia menjadi jalan menujuNya

melalui Nabi Muhammad SAW. Janji setia atau baiat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan ketundukan total kepada beliau yang juga janji setia tunduk ikhlas kepada Allah. Quran menyatakan: *Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya ia berjanji setia kepada Allah* (Qs.[48]:10). Janji atau baiat kepada seorang *syaikh* atau Guru Sufi pada hakikatnya bukanlah janji kepada pribadi sang *syaikh*. Janji setia kepada *syaikh* adalah janji kepada Nabi karena *Syaikh* hanyalah berperan sebagai pancaran atau emanasi kenabian semata, yang dengan itu akan terikat kepada Sang Nabi menuju pada Allah Sang Maha Agung (Bentounes 2003: 32).

Sikap pengendalian olah batin dalam tradisi tasawuf yang tidak mudah, menjadikan peran Guru Sufi atau *syaikh* sangat penting. Seorang *syaikh* diharapkan mampu melakukan bimbingan terhadap proses pembersihan batin guna menyembuhkan beragam penyakit yang mengganggu kondisi jiwa seseorang. Seorang *syaikh* diharapkan mampu membuang semua penyakit yang tersembunyi dalam hati dan batin seseorang (al Kurdi 2013: 180).

Para guru sufi dan *syaikh* ini banyak menggunakan pendekatan kultural baik musik, seni, bahkan tarian sufi yang dianggap suci untuk mendekati Tuhan. *Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan*

mencintai keindahan (HR. Muslim no.91). Keindahan ini dijalankan oleh banyak kelompok tarekat yang dipimpin oleh *syaikh* dalam tasawuf yang menjadikan Islam begitu indah. Diantara para ulama Islam, ulama-ulama sufi adalah ulama yang paling menghargai dan yang paling besar perhatiannya terhadap seni dan sastra. Salah satu tokoh sufi besar yang juga melahirkan karya-karya syair agung adalah Jalaluddin Rumi (Faiz 2015: 5).

Bercermin Dari Rumi dan Ibnu Qoyyim

Rumi sebagai salah satu penyair Islam terbesar yang pernah ada menyerap syair-syairnya dari nilai dan ajaran Islam yang kental. Ketika sebagian mengharamkan musik, maka para ulama sufi menggunakan musik dan syair-syair dalam menuangkan kecintaan keindahan batiniahnya akan Tuhannya. Rumi melalui syair-syairnya memiliki banyak tema tetapi tetap terfokus pada sebuah kebenaran sentral Islam, yaitu keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam syairnya sesungguhnya ia merujuk kepada ayat-ayat yang terdapat dalam Quran (Schimmel 2016: 150). Salah satu syair Rumi menjelaskan mengenai pencarian manusia akan eksistensi Tuhan:

*Dia Tidak Di Tempat Lain
Salib dan ummat Kristen,
ujung ke ujung, sudah kuuji.
Dia tidak di Salib.*

*Aku pergi ke kuil Hindu, ke
pagoda kuno.*

*Tidak ada tanda apa pun di
dalamnya.*

*Menuju ke pegunungan
Herat aku melangkah,
dan ke Kandahar Aku
memandang.*

*Dia tidak di dataran tinggi
maupun dataran rendah.
Dengan tegas,*

*aku pergi ke puncak
gunung Kaf (yang menakjubkan).*

*Di sana cuma ada tempat
tinggal*

*(legenda) burung Anqa.
Aku pergi ke Ka'bah di
Mekkah.*

*Dia tidak ada di sana.
Aku menanyakannya
kepada Avicenna (Ibnu Sina) sang filosof
Dia ada di luar jangkauan
Avicenna ...*

*Aku melihat ke dalam
hatiku sendiri.*

*Di situlah, tempatnya, aku
melihat dirinya.*

Dia tidak di tempat lain

Syair yang dalam akan makna pencarian Tuhan oleh seorang Rumi melalui syair yang indah. Rumi menjelaskan tentang usaha anak manusia untuk mengenal Tuhannya. Rumi menjelaskan makna-makna dan simbol-simbol religius dalam pendekatan budaya berupa kata salib, pagoda, kuil, masjid, dan beberapa ruang geografis tempat pusat religi sebagai simbol peradaban besar manusia. Dalam proses tersebut proses pencarian berakhir pada jati diri manusia dan bukan pada simbol relik dan religi geografi. Pendekatan filosofis dan sufistik

ini menjelaskan sebuah makna akan keberadaan Tuhan yang sejati berada dalam hati setiap anak Adam. Rumi menjelaskan hakikat-hakikat *tauhid* dengan cerdas, bahwa eksistensiNya tidak dapat dibatasi oleh ruang tempat dan waktu. Pendekatan Sufisme Islam dalam ranah kultural ini memberikan warna-warna religius yang kuat lagi indah.

Kecintaan umat Islam kepada Nabi Muhammad Saw yang begitu besar tidak diungkapkan dalam lukisan atau gambar Sang Nabi melainkan dengan keindahan syair. Seorang penyair Urdu mengungkapkan kecintaannya:

*Keindahan dari ujung kaki
hingga ujung kepala*

*Cinta yang menjelma
menjadi raga*

Dalam syair indah tentang Nabi, seorang penyair Urdu, Dagh menyebut Nabi Muhammad Saw sebagai Cahaya Tuhan:

*Cahayamu ada dalam
ketampanan Yusuf, wahai Cahaya Tuhan;
Yang membuat mata
Ya'qub pun tersembuhkan (Schimmel
1991: 57).*

Rumi dan penyair Urdu tersebut mampu menghadirkan sebuah kekaguman dan kecintaan atas Nabi Muhammad Saw. Nabi Saw dilukiskan dalam syairnya sebagai cahaya Tuhan yang penuh dengan cinta terhadap manusia. Ketika gambar dalam tradisi Islam untuk melukiskan Nabi

Muhammad Saw tidak diperkenankan, maka syair digunakan untuk menunjukkan rasa cinta yang mendalam terhadap beliau Saw. Syair ini menggambarkan fenomena keindahan sebagai bentuk ungkapan jiwa spiritual manusia.

Nilai-nilai keindahan spiritual ini tidak berbenturan dengan gagasan-gagasan *fiqih* yang selama ini dipandang kurang lentur terhadap gagasan-gagasan kultural. Beberapa ulama *fiqih* juga terlibat dalam kegiatan tasawuf, yang dengannya ia mampu menjelaskan segala hal menjadi lebih mudah. Muhammad Amin al-Kurdi, salah seorang ahli *fiqih* Universitas Al Azhar Kairo bahwa ilmu tasawuf sebagai sebuah ilmu yang tinggi posisinya, karena tasawuf menyentuh ruang ruhani untuk membersihkan hati yang ternoda oleh hawa nafsu (al-Kurdi 2013: 179). Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Beliau sebagai ulama besar dan sekaligus murid dari ulama besar Ibn Taimiyyah, juga terlibat dalam pemikiran dan gagasan yang kental dengan nuansa sufisme.

Dalam buku *Madarijus Salikin*, Pendakian Menuju Allah, Ibn Qayyim al-Jauziyah menjelaskan makna-makna dan hakikat Ketuhanan yang mendalam. Dalam tahapan-tahapan pendakian menuju Tuhan, beliau menjelaskan adanya tahapan *mahabbah* atau cinta sebagai tempat persinggahan. Cinta merupakan santapan ruhani, dan yang tidak memiliki rasa cinta

bagai orang yang mati. Cinta adalah kelezatan dan ruh dari iman dan amal, kedudukan dan keadaan, yang tanpanya maka manusia hanyalah seonggok jasad tanpa ruh. Dengan mengutip pendapat ahli tasawuf Al-Junayd, Ibn Qayyim menjelaskan bahwa hakikat cinta itu sendiri adalah ketika seseorang terlepas dari dirinya sendiri dan senantiasa menyebut nama Allah. Dia beserta, berasal, bersama, dan menjadi milik Allah (al-Jauziyah 2009: 421-426).

Proses mengetahui Tuhan menjadi hidup ketika ia disentuh dengan pendekatan intuitif yang melibatkan jiwa yang dipenuhi oleh cinta kepadaNya. Karena Tuhan adalah Maha Ghaib maka gerak akal dipandu dengan gerak hati mencoba meraba kehadiran Tuhan. Inilah epistemologi sufistik yang mencoba untuk mendorong manusia lebih jauh dalam proses perkenalannya dengan Tuhan. Tawaran tasawuf tentang hakikat manusia dalam alam merupakan jawaban dari kekeringan spiritual dan kegersangan ilmu pengetahuan yang melanda (Riyadi 2014: 97).

Rumi dan Ibn Qayyim pada hakikatnya tidaklah keluar dari ruang dimensi *syariah*, tetapi ia menjelaskan *syariah* melalui metode-metode kultural. Proses-proses dialogis antara sufisme dan ide-ide kultural ini membuat Islam begitu mudah diterima dalam berbagai ragam

kebudayaan yang majemuk. Proses epistemologis sufisme yang pada awalnya mendapat tantangan berat dari kelompok *fiqih* lambat laun mampu menjadi sebuah paradigma yang mandiri ketika ia berhadapan sekaligus berdampingan dengan beragam paradigma lainnya. Proses penerimaan tasawuf sebagai sebuah cabang ilmu Islam dilakukan secara berkelanjutan dan tidak lepas dari proses falsifikasi yang selalu identik dengan perkembangan dinamis setiap ilmu (Riyadi 2016: 65).

Metode kultural dalam ruang epistemologi ini mampu menjangkau keanekaragaman pemahaman yang begitu terikat kuat pada proses struktur budaya. Islam tidak dengan gegabah membuang setiap konstruksi budaya. Sufisme Islam menyuntikkan gagasan dan ajaran-ajarannya ke dalam struktur budaya, sehingga memberi warna baru setiap budaya walau tanpa merubah struktur forma budaya. Inilah keunggulan epistemologi sufisme ketika bertemu dengan ragam budaya yang ada. Sufisme mampu diterima dalam beragam budaya mengingat sifat lentur dan sikap yang akomodatif terhadap beragam lingkungan yang ada.

Pengaruhnya Terhadap Islam di Nusantara

Masuknya Islam di Nusantara di awal-awal masa dakwah melalui jalur-jalur perdagangan dan berinteraksi dengan nilai kultur setempat. Para Guru Sufi melakukan proses-proses pendekatan dengan budaya lokal, sehingga terlihat bahwa masuknya Islam ke Indonesia melalui cara-cara yang inklusif dan akomodatif dengan budaya lokal. Proses akomodasi kultural dapat dilihat dari kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya lokal tanpa harus kehilangan nilai-nilai pokok keislaman (Abdullah dan Azra 2003: 29).

Islam yang berkembang di Nusantara melalui proses-proses damai dibawa oleh kelompok-kelompok Sufi. Para kelompok sufi ini yang juga menyebarkan Islam melalui masjid dan *funduq* (pondok) dengan konsep perembesan damai (*penetration pacifique*). Watak kesufian yang mengandalkan pada rasa (*dzauq*), maka pemikiran Islam yang muncul diwarnai dengan sikap resesif (pembawaan mudah menerima) terhadap unsur-unsur budaya lokal (Madjid 2010: 26).

Pada proses penyebaran Islam di Jawa, para penyebar Islam khususnya Wali Songo menciptakan *tembang* yang mudah dinyanyikan oleh masyarakat. Sunan Giri menciptakan *Sinom* yang berarti Nur, Sunan Kalijaga menciptakan *tembang Dandhanggulo* yang berarti *angacap*

manis atau harapan bahagia. Sunan Bonang menciptakan *Durmo* yang berarti macan yang melambangkan tingkatan hawa nafsu. Sunan Muria menciptakan *Pangkur* yang berarti pembasmi hati yang jahat. Parepen menciptakan *Anerang jawuh* yang berarti meninggalkan alam yang kotor agar tercipta ketenangan. Sedangkan Sunan Gunung Jati menciptakan *tembang Pucung* yang berarti sifat halus (Abdullah dan Azra 2003: 34). *Tembang* adalah sarana dakwah untuk memahami nilai Islam kepada masyarakat Jawa dengan nilai-nilai Jawanya. Islam berinteraksi dan memperkaya budaya Jawa, pada bentuk ini Islam telah membentuk hukum adat yang tidak saja bernilai budaya lokal tetapi telah dimuati oleh nilai dan hukum Islam.

Proses peletakan budaya dalam memahami ajaran-ajaran Islam tampak jelas dalam metode dakwah dan pemahaman yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga sebagai salah seorang penyebar dakwah Islam di Tanah Jawa. Ia memadukan spiritualisme Islam dan Jawa dalam bait-bait syair *Rumeksa ing Wengi*. Ia menciptakan kidung tersebut dengan mengambil pada nilai-nilai Islam yang kuat yang ia letakkan dalam struktur budaya Jawa. Kidung tersebut merupakan bentuk doa kepada Allah yang ia adopsi dari ayat Kursi yang tertera Surah Al-Baqarah ayat 255 Kitab Suci Quran. Doa

berisi perlindungan dari beragam gangguan jin dan berbagai malapetaka yang mengancam manusia (Chodjim 2013: 19). Dari sini tampak bahwa Islam menerapkan sebuah metodologi yang mengutamakan manfaat dan kebaikan Islam (Mulkhan 2005: 100).

Proses-proses kebudayaan ini tidak saja diletakkan dalam konteks strategi dakwah saja, melainkan lebih jauh padacara berIslam sesuai basis nilai kulural masing-masing kelompok sosialnya. Pendekatan Geertz terhadap Islam kultural Jawa contohnya, dengan pembagian kelompok sosial Jawa menjadi abangan, santri, dan priyayi walau mendapat kritik tajam dari beberapa peneliti khususnya Lombard, tetapi dapat dijelaskan tentang analisis Geertz terhadap peran santri di Jawa. Abangan merupakan kelompok sosial yang diwarnai oleh animisme dan hanya pada permukaannya terpadu dengan Islam. Santri sebagai kelompok sosial yang umumnya hidup sebagai pedagang menjalankan Islam secara murni, cenderung keras dan ortodoks. Priyayi sebagai kelompok sosial bangsawan yang kental dengan filsafat Jawa yang diperkaya oleh sufisme dan juga ajaran Hindu-Buddha. Santri yang terikat dengan kehidupan pesantren identik dengan pakaian putih yang dikenakan sehingga acapkali disebut sebagai kelompok putihan. Kelompok sosial santri

ini lebih tepat disebut sebagai kelompok yang taat beribadah dibandingkan dengan istilah ortodoks yang mengandung makna kurang baik. Kelompok santri menurut Lombard tidak dapat disederhanakan dengan pendekatan Geertz. Kelompok santri juga menerima gagasan reformis yang umumnya adalah pedagang, dan kelompok santri konservatif yang umumnya berasal dari santri jaringan agraris (Lombard 2008: 85-87).

Kelompok santri yang putihan ini tidak dapat diidentikkan secara sederhana sebagai kelompok-kelompok ortodoks sebagaimana yang diutarakan oleh Geertz. Pada kelompok santri di lingkungan pesantren terdapat interaksi kultural dengan budaya-budaya lokal, yaitu bertemunya budaya dan tradisi lama dengan ajaran Islam. Simuh melihat bahwa tradisi *selamatan* sebagai unsur budaya Jawa ternyata bertemu dengan unsur-unsur Islam di lingkungan pesantren. Di luar Jawa seperti di Sumatera Barat dan budaya Melayu umumnya terjadi pula pelestarian budaya pra-Islam. Tradisi lama terjalin dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam pepatah Minangkabau dinyatakan: *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Pepatah ini menunjukkan adanya ketahanan nilai-nilai tradisi lokal dengan ajaran Islam (Simuh 2003: 86).

Dengan penjelasan Simuh tersebut, dapat dilihat bahwa nilai-nilai tradisi

budaya lokal beserta hukum-hukum adatnya justru mendapatkan penguatan dari ajaran-ajaran Islam. Islam dalam banyak hal ketika bertemu dengan tradisi lokal tidak kemudian menghilangkan semua tradisi lokal, tetapi memberikan penguatan dengan memasukkan nilai-nilai Ketuhanan yang kuat di dalamnya. Karakter budaya lokal yang mengutamakan simbol-simbol, karena bercorak magis lalu menyerap nilai religi Islam dalam banyak hal. Kekuatan-kekuatan magis dalam budaya lokal mendapat banyak serapan dari nilai Islam. Pada struktur budaya yang memiliki resapan nilai Islam hakikatnya ia tidak menjadi ruang yang semata digerakkan oleh akal dan nafsu. Ketika budaya memperoleh asupan nilai religius tersebut, maka sejatinya ia mengarahkannya pada jalan Tuhan.

Proses internalisasi ke dalam substansi struktur budaya lokal ini memperkaya budaya-budaya lokal setempat. Islam yang menginternalisasi struktur budaya dapat menjadi pengendali atas keberlakuan budaya yang tidak humanis. Ia mengendalikan budaya dan sekaligus mengajaknya berada pada rel Ketuhanan. Inilah Islam yang memiliki fungsi-fungsi humanis bagi manusia. Islam membuka pintunya bagi terciptanya koeksistensi terhadap ruang sosial dan etnik (Boisard 1980: 196).

Segeanp praktik pemahaman, penghayatan, serta praktik kesalihan seorang muslim menjadi beragam. Lingkungan sosial, ekonomi, pendidikan juga pekerjaan menjadi faktor penting yang menjadikan adanya keragaman dalam kehidupan keagamaan seseorang dalam masyarakat. Perubahan sosial-ekonomi juga menentukan perubahan tingkat pemahaman dan kesalehan seseorang dalam masyarakatnya. Hal ini menunjukkan adanya keragaman atas tingkat pemahaman akan Islam bagi seorang muslim merupakan sebuah proses sosial budaya yang terus berubah dan berlangsung sepanjang hidupnya (Mulkhan 2005: 51).

Inilah interaksi antara Islam kultural dengan Islam *syariah* di Jawa. Ide Islam kultural yang bersamaan tumbuh dan berkembang dalam pemahaman rakyat. Dalam pendekatan religi Islam di kalangan rakyat, Tuhan adalah sesuatu yang sakral. Tuhan selalu dikaitkan atau menempel di banyak tempat yang bersifat profan dan keseharian. Ketika tempat keseharian dan profan itu dilekatkan padaNya, maka tempat itu kini difahami sebagai tempat yang disucikan karena menyangkut hal-hal Ketuhanan yang bersifat kegaiban. Makkah dan Madinah adalah dua kota suci yang dikeramatkan oleh masyarakat karena keduanya sebagai tempat lahir dan juga kehidupan Nabi Muhammad Saw. Di

tempat yang memiliki makna suci ini, muncul keyakinan bahwa semua perbuatan manusia akan mendapat tindakan balas seketika dari Tuhan. Keyakinan akan adanya gagasan bahwa Tuhan melekat pada manusia dan benda-benda profan tersebut terdapat dalam tradisi sufistik. Kekuatan supranatural Tuhan dapat muncul dalam benda-benda yang berkait dengan kehidupan manusia. Dalam persepsi *wong cilik*, pemahaman akan seseorang yang dianggap memiliki kekuatan supranatural ini dianggap sebagai pusat dari kehidupan orang awam. Orang saleh yang dianggap dekat dengan Tuhan karena dianggap memiliki kedekatan dengan Tuhan inilah yang menghubungkan antara Tuhan yang tak terjangkau dengan *wong cilik*. Ini adalah sebuah pemahaman akan Islam yang tentunya terikat dengan gagasan kultural *wong cilik* atau masyarakat bawah pedesaan yang terkadang berbeda dengan masyarakat kelas perkotaan yang lebih faham akan kesalehan secara syariah (Mulkhan 2005: 26-30).

Dalam pendekatan kultur *wong cilik* ini, segala yang magis melekat pada setiap ruang kesehariannya. Nilai ketuhanan yang suci melekat pada setiap benda. Tidaklah mengherankan masyarakat juga meletakkan kesucian itu pada makam para ulama atau tokoh wali yang dikeramatkan, sehingga

memunculkan identitas dan simbol suci terhadap makam. Makam keramat para wali diletakkan sebagai sebuah ruang kebebasan, dan makam wali itu menghadirkan nilai keramat bagi masyarakat. Makam wali yang dikeramatkan tersebut menjadi tempat untuk mengungkapkan rasa religius yang bebas selain juga tempat memelihara situs kuno. Jika sembahyang di masjid menunjukkan nilai keseragaman dunia Islam, maka makam wali menunjukkan keanekaragaman budaya yang tercakup di dalam dunia Islam. Makam yang memperoleh simbol-simbol magis tersebut menjadi tempat perwujudan hasrat untuk melepaskan diri dari segenap aturan-aturan sosial dan alamiah. Makam-makam wali yang disucikan tersebut menjadi tempat yang damai dari segala kekacauan dunia (Loir dan Guliot 2007: 14-15).

Sikap toleransi Islam terhadap ajaran agama lainnya dapat mengacu pada sikap Nabi Muhammad Saw dan para Sahabat pada era awal Islam. Sikap intoleran terhadap budaya dan manusia lainnya terjadi ketika terdapatnya kelompok-kelompok menjalani hidup sesuai dengan doktrin yang mereka yakini. Mereka tidak saja berupaya memberdayakan diri, melainkan juga secara agresif berupaya untuk melemahkan, mendominasi, atau mungkin

menghancurkan orang lain (El-Fadl 2003: 21).

Manusia dan kebudayaannya kini berinteraksi dengan Islam. Pada bentuk ini maka Islam memberikan corak-corak pada beragam kebudayaan Indonesia. Islam yang telah masuk secara damai dan menyerap dalam berbagai kultur kini juga berhadapan dengan nilai-nilai modernitas. Kebudayaan yang memiliki karakter yang terus berubah secara dinamis menjadikan Islam juga harus terus berinteraksi secara positif dengan kemajuan peradaban manusia. Islam berinteraksi dengan nilai demokrasi sipil serta hak azasi manusia. Islam tidaklah menjadi agama yang statis karena muatan universalnya. Dalam bentuk masyarakat sipil, maka nilai-nilai kemanusiaan menjadi mengemuka. Nilai-nilai ini dibangun atas dasar persamaan kedudukan serta kesederajatan, baik kesederajatan budaya dan etnis. Kesederajatan ini tampak jelas pada ayat Quran: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain, boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka.”* (QS. Al Hujuraat :11).

Kesimpulan

Dalam kajian tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa hal: Pertama, bahwa sikap toleransi Islam melalui tasawuf terbukti sejak masa penyebaran

Islam telah mampu diterima secara baik oleh masyarakat lokal. Penerimaan masyarakat Jawa terhadap Islam melalui epistemologi Tasawuf justru semakin memperkaya budaya Jawa. Para ulama awal mencoba mengembang misis dakwah kultural kepada masyarakat lokal dengan menginternalisasi budaya-budaya loka. Dalam pendekatan Friedman, maka budaya lokal mampu menyerap dan mengakomodasi *syariah* yang datang sehingga penerimaan hukum Islam lebih mudah diterima oleh kultur lokal setempat.

Kedua, bahwa interaksi tasawuf dan syariah bukanlah saling bertentangan, pelaksanaan *syariah* mampu dijelaskan secara lebih mudah dengan metodologi *tasawuf* dalam beragam penerimaan sesuai basis kultur masing-masing kelompok sosial. Dalam pendekatan Friedman, maka budaya hukum lokal menerima proses-proses adaptif atas masuknya hukum-hukum baru melalui proses-proses kultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Riyadi, *Antropologi Tasawuf, Wacana Manusia Spiritual dan Pengetahuan*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 2014
- Abdul Munir Mulkhan, *Makrifat Siti Jenar, Teologi Pinggiran dalam Kehidupan Wong Cilik*, Penerbit Grafindo, Jakarta, 2005
- Achmad Chodjim, *Sunan Kalijaga, Mistik dan Makrifat*, Penerbit Serambi, Jakarta, 2013
- al-Jauziyah, Ibn Qayyim, *Madarijus Salikin, Pendakian Menuju Allah*, Penerbit Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2009
- al-Kurdi, Muhammad Amin, *Tanwirul Qulub, Menerangi Qalbu, Manusia Bumi, Manusia Langit*, Penerbit Pustaka Hidayah, Bandung, 2013
- Azyumardi Azra, *Tasawuf dan Tarekat*, dalam Ensiklopedi Tematik Dunia Islam, Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2002.
- Bentounes, Khaled, *Tasawuf Jantung Islam, Nilai-Nilai Universal dalam Tasawuf*, Penerbit Pustaka Sufi, Jogjakarta, 2003
- Boisard, Marcel, *Humanisme dalam Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1980
- El-Fadl, Khaled Abou, *Cita dan Toleransi Islam, Puritanisme versus Pluralisme*, Penerbit Arasy Mizan, Bandung, 2003
- Fahrudin Faiz, *Sufisme Persia dan Pengaruhnya terhadap Ekspresi Budaya Islam Nusantara*, Jurnal Esensia, Vol.17, No.1, April 2016, <[http: e-journal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia](http://e-journal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia)>
- Hamka, *Perkembangan dan Pemurnian Tasawuf, Dari Masa Nabi Muhammad Saw hingga Sufi-sufi Besar*, Penerbit Republika, Jakarta, 2016

- Irwan Abdullah dan Azyumardi Azra,
Islam dan Akomodasi Kultural, dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jilid 5, Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003
- Lair, Herry Chambert & Claude Gulliot,
Ziarah dan Wali di Dunia Islam, Penerbit Serambi, Jakarta, 2007
- Lombard, Denys, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Jaringan Asia*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2008
- Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Penerbit Paramadina, Jakarta, 2010
- _____, *Arkeologi Tasawuf, Melacak Jejak Pemikiran Tasawuf dari Al Muhasibi hingga Tasawuf Nusantara*, Penerbit Mizan, Bandung: 2016
- Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Penerbit Komunitas Bambu, Depok, 2015
- Schimmel, Annemarie, *Akulah Angin, Engkaulah Api, Hidup dan Karya Jalaluddin Rumi*, Penerbit Mizan, Bandung, 2016
- _____, *Dan Muhammad adalah Utusan Allah, Cahaya Purnama Kekasih Tuhan*, Penerbit Mizan, Bandung, 1991
- Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*, Penerbit Teraju, Jakarta, 2003

POLITIK DAN PEREMPUAN DI INDONESIA PASCA REFORMASI

Oleh: Indra Fauzan*

ABSTRACT

Women in the political context of Indonesia has a very significant role, because the position of women in politics in Indonesia not yet well established and sometimes even impressed marginalized because of the position of women in politics is always behind man. This can be seen in various positions in political parties, political organizations and even in Parliament though. This indicates that women's political participation is still very limited so that the position of women in politics in Indonesia is still very weak, so in need of a strategy to increase women's political participation in Indonesia either from the lowest to the highest rank. Although there is affirmative action to increase women's political participation in politics but it does not guarantee that the political position of women to be equal to men colleagues Because there are not many women who want and memiliki opportunity for a career and strive in the path of politics. Many problems encountered principally in Indonesian culture. This study will explore how women's political participation in the political context in Indonesia and is expected to add to the treasures of female political discourse itself.

Keywords: Womens, Politics, Political Participation, Reform.

*Mahasiswa pada Program Ph.D Institut Kajian Etnik (KITA) Universiti Kebangsaan Malaysia dan Dosen pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Email: fauzan_ukm@yahoo.com.

Pendahuluan

Peran politik perempuan di Indonesia merupakan salah satu yang cukup signifikan untuk dikaji dan dilihat, bagaimana perempuan Indonesia mampu mengekspresikan diri mereka dalam panggung politik bersaing dengan kaum laki-laki sebagai bentuk dari pencarian persamaan hak dan kewajiban dalam politik itu sendiri, tak dapat dipungkiri bahwasanya di Indonesia politik merupakan domain laki-laki dan dominasi kaum pria merupakan sebuah keniscayaan dan terkadang begitu mutlak dan tidak terusik sama sekali.

Pada masa revolusi kemerdekaan, perempuan memiliki peran yang sangat signifikan terutama di beberapa daerah perlawanan yang mengharuskan perempuan mengambil alih kepemimpinan melawan penjajah, ambil contoh Tjut Nyak Dhien, Tjut Nyak Mutia, Dewi Sartika, Kartini dan beberapa tokoh perempuan lainnya. Ini mengindikasikan bahwa perempuan bukan makhluk yang lemah dan bukan makhluk harus didominasi, karena secara politik peran perempuan adalah sama dengan kaum pria dan mereka memiliki kekuatan politik yang besar terutama dalam jumlah populasi.

Harus diakui memang bahwa peran perempuan dalam politik agak termarginalkan dan jauh dari kesan

emansipatif dan perempuanpun menerima paradigma tersebut bahwa politik merupakan wilayahnya kaum laki-laki, perempuan hanya punya peran sebagai istri, ibu, dan pendamping kaum pria, tidak punya kekuatan untuk mengambil kebijakan, menentukan arah kebijakan dan mengeksekusi kebijakan itu sendiri sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintahan terkadang tidak berorientasi dan tidak berpihak kepada perempuan itu sendiri.

Setelah reformasi bergulir, jatuhnya rezim presiden Soeharto yang telah berkuasa lebih dari 32 tahun lamanya, keran kebebasan dan berkekespresi menjadi lebih terbuka. Demokrasi yang dieluk-elukkan sebagai sebuah sistem yang ramah kepada semua pihak mulai menjalani perannya yang baru, kalau pada masa orde lama dan orde baru, demokrasi terasa bias dan terkadang malah lari dari pakemnya. Pada era reformasi demokrasi seolah-olah menjadi jalan keluar yang terbaik dan merupakan surga bagi kebebasan. Apakah itu kebebasan pers, kebebasan berkespresi, berpendapat, bersyarikat dan macam-macam bentuk kebebasan lainnya.

Perempuan merupakan salah satu komoditas politik yang dianggap penting oleh negara ini pasca reformasi, bagaimana peran-peran perempuan dalam politik sedikit demi sedikit mulai muncul

kepermukaan, eksistensinya mulai diakui dan keterwakilan perempuan dalam partai politik mulai dimasukkan, quota 30 % keterwakilan perempuan mulai di akomodir, walaupun pada awalnya mendapat resistensi dari beberapa kalangan.

Eksistensi perempuan dalam politik setelah reformasi berlangsung lebih dari sepuluh tahun berjalan lamban dan agak sedikit diluar perkiraan, banyak faktor seperti yang menghambat laju dari eksistensi politik perempuan baik secara partisipasi maupun eksistensi. Karena terkesan bahwa perempuan masih belum bisa lepas dari kungkungan budaya dan pemahaman tentang bagaimana perempuan Indonesia itu semestinya. Masih banyak perempuan Indonesia masih belum mandiri secara politik, pendidikan dan pemahaman perempuan akan politik masih kurang. Politik perempuan masih bergantung kepada laki-laki ini terwujud dalam kegiatan-kegiatan politik semisal Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif, keanggotaan atau kepengurusan dalam partai politik dan lain sebagainya, partisipasi politik perempuan sangatlah rendah.

Berdasarkan latar belakang tersebut artikel ini mencoba meninjau dan menganalisis bagaimana partisipasi politik perempuan di Indonesia selama ini, serta untuk menggugah kesadaran golongan

perempuan betapa pentingnya bidang politik dalam kehidupan mereka. Karena dengan pemahaman mereka akan politik serta pengambilan kebijakan akan membuat perempuan lebih mandiri dan kritis terhadap hidup mereka. Sebab bagaimanapun juga ketika perempuan memahami politik akan membawa dampak kepada pentingnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya dalam skope yang lebih luas, sehingga menghindarkan perempuan dari beberapa efek negatif yang sering muncul belakangan ini, seperti: Kekerasan dan perdagangan manusia (*human trafficking*).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan partisipasi politik dan sistem politik, di mana keterlibatan perempuan dalam politik disorot dari aspek derajat partisipasi mereka yang dikaitkan dengan perubahan-perubahan dalam sistem politik Indonesia pasca reformasi. Sementara dalam pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dan dokumen.

Kajian Pustaka

Sejauh ini kajian-kajian tentang peranan perempuan di dalam bidang politik telah dilakukan banyak pakar, terutama pasca reformasi 1998. Hasil-hasil kajian tersebut muncul dalam karya-karya baik dalam jurnal ilmiah, penulisan disertasi, tesis dan penelitian-penelitian

lainnya. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti yang dilakukan oleh M. Zainuri (2007), Nurhidayah (2012) dan juga Khofifah Indar Parawangsa (2002).

M. Zainuri (2007) adalah antara peneliti yang berminat pada partisipasi politik perempuan, dalam tesisnya yang berjudul “Partisipasi Politik Perempuan (Perspektif Tradisi Islam Lokal Kudus)” beliau menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan bagi perempuan tradisional di Kudus, yang terkenal dengan kota santri, sentra penyebaran agama Islam oleh Sunan Kudus pada masa lalu. Di daerah tersebut tokoh agama, yakni kyai memiliki kedudukan yang sangat penting dan dihormati. Masyarakat Kudus menjadikan “kitab kuning” yang berisi pedoman ajaran-ajaran Islam sebagai rujukan utama kehidupan mereka.

Dalam penelitiannya, M Zainuri melihat bahwa masyarakat Kudus yang tradisional dan fanatik terhadap ajaran-ajaran dari kitab kuning memandang sinis terhadap perempuan yang berpartisipasi dalam politik, baik sebagai kader partai ataupun simpatisan partai. Keadaan demikian membuat perempuan Kudus merasa terhambat baik secara politik, sosial budaya, psikologis dan agama sehingga selama pemilihan umum yang dilaksanakan sebelum masa reformasi

perempuan Kudus hanya aktif berpartisipasi dalam penyaluran suara saja. Tetapi pasca reformasi telah terjadi perubahan arah pemikiran perempuan, di mana mereka berani keluar dari kungkungan sempit aturan tradisional kitab kuning dan mencoba menjadi bagian dari partai politik meskipun kebanyakan berawal dari organisasi sayap partai-partai politik tertentu, dilanjutkan dengan menjadi aktivis partai politik bahkan menjadi anggota legislatif.

Sementara itu Nurhidayah (2012) dalam *Journal of Educational of Social Studies* menuliskan penelitiannya yang berjudul “Partisipasi Politik Anggota Legislatif Perempuan Dalam Penambilan Kebijakan” lebih melihat aspek partisipasi politik anggota legislatif perempuan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan sesuai dengan fungsi-fungsi dewan perwakilan. Nurhidayah melihat bahwa partisipasi politik perempuan di legislatif belumlah optimal dalam penyaluran-penyalurkan aspirasinya. Menurut beliau, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya peran anggota legislatif perempuan dalam parlemen di antaranya adalah; wawasan dan pengalaman perempuan dalam politik masih sangat terbatas, kepentingan politik jauh lebih dominan dibandingkan kepentingan masyarakat atau kelompok masyarakat.

Nurhidayah berpendapat para anggota legislatif perempuan harus lebih optimal dalam memahami prinsip-prinsip pengarusutamaan gender (PUG) atau kesetaraan gender, sekaligus memiliki kesiapan dan kesediaan waktu serta tenaga untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sesuai dengan nilai-nilai moral maupun bangsa yang bermartabat dan berkeadaban.

Dalam studi yang lain Khofifah Indar Parawansa (2002) dalam tulisannya dalam IDEA International yang berjudul *“Obstacles to Woman’s Participation in Indonesia”* menyatakan bahwa hambatan perempuan dalam politik di Indonesia diakibatkan oleh budaya patriakial yang tidak diimbangi oleh akses dalam bentuk afirmasi bagi perempuan. Walaupun dalam Undang-Undang 1999 Bab X ayat 27 menyatakan bahwa “semua warga Negara sama di mata hukum dan pemerintah” sedangkan ayat 28 menjamin “kebebasan berkumpul dan berserikat, dan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.”

Sekalipun demikian dalam kondisi patriakhal, perempuan menghadapi kendala untuk mensejajarkan diri dengan laki-laki dalam berbagai bidang. Beberapa hambatan tersebut seperti faktor budaya, ekonomi, pendidikan dan juga situasi yang dihadapi oleh kebanyakan perempuan, seperti mementingkan kepentingan

keluarga daripada berjuang sampai tengah malam dalam politik.

Dari beberapa penelitian di atas, partisipasi politik perempuan kebanyakan terbatas karena beberapa sebab, seperti; budaya dominan di setiap daerah adalah patriakhal, akses pendidikan perempuan yang terbatas, ketergantungan ekonomi terhadap suami, peranan sebagai ibu rumah tangga yang sulit untuk berlama-lama di parlemen, dan kebanyakan juga perempuan apatis terhadap aktivitas politik dan cenderung menjadi pemilih pasif dalam pemilihan umum saja.

Konsep-Konsep Partisipasi Politik Perempuan

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik bukanlah barang baru dalam dunia ilmu politik, hal ini untuk melihat sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam politik baik secara konvensional atau non konvensional. Banyak istilah dan pengertian tentang partisipasi politik, sedangkan secara umum partisipasi politik itu sendiri mengacu pada kegiatan orang-orang dari semua tingkatan politik, misalnya pemilih (pemberi suara) berpartisipasi dengan memberikan suaranya dalam sebuah pemilihan umum, sehingga bias dikatakan partisipasi politik itu adalah penentuan sikap dan keterlibatan individu dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara dalam rangka mencapai cita-cita bangsanya. Sedangkan secara harfiah partisipasi politik menurut Jean Jacques Rousseau dalam bukunya *The Social Contract* mengatakan bahwa partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kewarganegaraan, di mana melalui partisipasi individu dan menjadi warga publik, mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat. Sementara itu, John Stuart Mill menyatakan bahwa tanpa partisipasi nyaris semua orang akan ditelan oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan pribadi mereka yang berkuasa.

Beberapa pakar politik memberikan pendapat mereka tentang apa itu partisipasi politik, di antaranya adalah:

- a. Herbert Mc Closky, yang menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung terlibat dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum (Rush dan Althoff 196: 123-125).
- b. Norman H. Nie dan Sidney Verba mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga Negara yang legal dan sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan/atau

tindakan-tindakan yang mereka ambil (Almond 1974: 48).

- c. Miriam Budiarjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalam partai politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tak langsung dalam pembentukan kebijakan umum (Budiarjo 1986: 52).
- d. Samuel P. Huntington, partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perbuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi politik juga bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, serta efektif atau tidak efektif (Riswandha Imawan 1991: 117).
- e. Ramlan Surbakti menyatakan bahwa Partisipasi Politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Surbakti 1999: 140).

Sedangkan dalam tulisan yang lain Myron Miner menekankan bahwa sifat sukarela dalam partisipasi politik dan mengemukakan menjadi anggota organisasi atau menghadiri rapat umum

atas perintah pemerintah bukanlah bentuk dari partisipasi politik (Huntington 1994: 10).

Dilihat dari pengertian-pengertian di atas bahwa partisipasi politik merupakan hak warga negara dan merupakan sebuah kegiatan politik yang bertujuan mencapai tujuan-tujuan politik dan melibatkan semua warga negara baik itu laki-laki dan juga perempuan tanpa diskriminasi gender, semua memiliki hak yang sama, sehingga perempuanpun berhak menggunakan haknya untuk melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan politik baik yang tersistematis ataupun tidak.

2. Bentuk dan Tingkat Partisipasi Politik Perempuan.

Kendati berbagai perangkat hukum telah dibuat dan disepakati tapi pada kenyataannya masih saja posisi perempuan pada saat ini masih termarginalkan, baik dalam kehidupan social, ekonomi apalagi politik, posisi perempuan menjadi sebuah posisi yang rentan konflik bahkan bisa menjadi posisi yang rentan akan perilaku-diskriminatif dari laki-laki. Hal ini bisa kita lihat dalam keterwakilan perempuan di parlemen ataupun di partai-partai politik, masih sangat sedikit peran perempuan disitu atau terkadang posisi perempuan hanya menjadi formalitas saja

untuk memenuhi kuota politik keterwakilan perempuan di parlemen.

Penting partisipasi politik bagi perempuan disebabkan persoalan partisipasi sangat berkaitan dengan masalah-masalah lain. Menurut MacKinnon (1989: 215) bahwa ketika hak politik terenggut maka hak-hak lainnya akan mengikuti (terenggut pula). Politik adalah ranah yang sangat fundamental bagi pemenuhan hak-hak lainnya. Hal ini mengingatkan kita akan pendapat politik yang mengatakan bahwa kekejaman politik adalah kekejaman yang paling menyengsarakan perempuan karena implikasinya adalah menggilas hak-hak perempuan dibidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan bentuk aktifitas-aktifitas lainnya.

Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik perempuan adalah pemahaman masyarakat terhadap perempuan, sepanjang yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya masih menganggap bahwa perempuan yang aktif bekerja di luar atau memenuhi hidupnya dengan beraktivitas diluar mendapat pandangan yang sinis dan akan mendapat reaksi yang jelek dari lingkungan disekitarnya dan direndahkan secara social.

Mengikut Pary G, Moyser G dan Day N (1992: 3) menyatakan partisipasi politik adalah bentuk keikutsertaan dalam

proses formulasi, pengesahan dan pelaksanaan kebijakan. Bentuk nyata partisipasi ini adalah keterwakilan perempuan baik di legislatif maupun di eksekutif, sehingga peran serta perempuan lebih terwakilkan dan juga partisipasi perempuan dalam politik lebih menonjol dan tidak termarginalkan, sehingga ada sinergi antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dan tidak ada diskriminasi gender.

Diskriminasi ini karena terjadinya persepsi yang merendahkan berdasarkan jenis kelamin secara tradisional bahwa perempuan lebih rendah daripada gender laki-laki. Selain itu ternyata peran gender melahirkan masalah yang perlu digugat, yakni ketidakadilan yang ditimbulkan oleh “peran gender” dan “perbedaan gender” tersebut. Mansour Fakih membagi asumsi ketidakadilan gender ini kepada lima sebab. Pertama, terjadi marginalisasi (kemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan. Meskipun tidak semua marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender, yang dipersoalkan dalam analisis gender adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender. Misalnya, banyak perempuan desa tersingkir dan menjadi miskin akibat program pertanian Revolusi Hijau yang hanya memfokuskan kepada petani laki-laki, karena asumsi petani pedesaan identik dengan laki-laki.

Kedua, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis sex, yang umumnya pada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat, maupun Negara, banyak kebijakan dibuat tanpa “menganggap penting” kaum perempuan. Misalnya, anggapan bahwa perempuan toh akan kedapur juga, mengapa harus sekolah tinggi-tinggi, adalah bentuk subordinasi yang dimaksudkan. Atau misalnya, perempuan itu emosional, dia tidak dapat dan tepat untuk memimpin partai atau menjadi manajer, hal ini adalah proses subordinasi dan diskriminasi yang disebabkan oleh gender.

Ketiga adalah pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap jenis kelamin tertentu, terutama terhadap kaum perempuan dan akibat dari *stereotype* itu terjadi diskriminasi serta ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat banyak sekali *stereotype* yang dilabelkan kepada kaum perempuan yang akibatnya membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan. Karena adanya keyakinan masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah (*bread winner*) misalnya, setiap pekerjaan yang dilakukan perempuan dinilai hanya sebagai tambahan dan oleh karenanya perempuan boleh dibayar lebih rendah.

Keempat, kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, karena perbedaan gender,

kekerasan disini dimulai dari kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai pada kekerasan yang berbentuk lebih halus seperti pelecehan (*Sexual harassment*) dan penciptaan ketergantungan. Banyak sekali kekerasan terjadi pada perempuan yang ditimbulkan karena *stereotype* gender.

Kelima, karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, banyak perempuan menanggung beban kerja domestic lebih banyak dan lebih lama (*burden*). Dengan kata lain 'peran gender' perempuan yang menjaga dan memelihara kerapian tersebut telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya semua pekerjaan domestic. Sosialisasi tersebut menjadikan rasa bersalah pada perempuan jika tidak melakukan, sementara bagi kaum laki-laki, tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan dibanyak tradisi dilarang berpartisipasi (Mansour Fakih 2002: 172-174).

Hal tersebut diatas menyebabkan timbul persepsi bahwa perempuan adalah berbeda dan sebagai warga kelas dua setelah laki-laki akibat persepsi gender yang salah dan melenceng jauh, akibatnya peran perempuan dalam segala bidang menjadi lebih sempit dan jauh dari kata sukses, dan laki-laki menikmati posisi

sebagai pemimpin dan bisa bertindak sesuka hati mereka. Ketidak kuasaan perempuan malah menjadi pijakan ketidakadilan dalam masyarakat terutama masyarakat tradisional, tidak ada ruang bagi perempuan untuk maju.

Sedangkan menurut Naqiyah (2005: 78) partisipasi politik perempuan dapat dilihat dalam tiga aspek yaitu akses, control, dan suara perempuan dalam proses pembuatan kebijakan (*Policy Making Procces*). Dalam kenyataannya kegiatan yang disebut diatas masih jauh dari kata ideal atau sangat kurang dan tidak berpihak pada perempuan.

Politik dan Perempuan

Pada konstelasi politik Indonesia posisi perempuan masih menjadi komoditas politik saja, tidak begitu berperan aktif dan tidak juga terlalu terpinggirkan, meskipun pada kenyataannya dalam beberapa penelitian tingkat partisipasi politik perempuan boleh dibilang masih rata-rata air, atau dengan kata lain tidak begitu menonjol prestasinya, banyak hal dan banyak pula faktor yang mempengaruhi tinggi - rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di Indonesia, terutama pada pemilihan kepala daerah dibeberapa tempat.

Pada pemilihan anggota legislatif bisa dilihat bahwa keikut sertaan

perempuan dalam pemilihan umum sangat sedikit dan bahkan hanya sekedar ingin memenuhi quota yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dan pada akhirnya malah perempuan yang duduk di legislatif malah sangat sedikit dan tidak memiliki kualitas yang baik karena sistem rekrutmen partai yang tidak terbuka dan terkesan asal comot saja.

Ketika era reformasi bergulir dan keran kebebasan dibuka selebar-lebarnya untuk semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan terutama dalam ranah politik, diharapkan peran serta masyarakat dalam menyukseskan reformasi sesuai dengan amanah reformasi untuk demokrasi yang lebih baik dan lebih peduli kesetaraan di semua sendi-sendi sosial maupun struktur masyarakat.

Sayangnya, pada ketika reformasi berjalan posisi perempuan dan kontribusi perempuan untuk politik masih minim terlihat, perempuan masih menjadi komoditas politik yang didominasi oleh kaum laki – laki saja, dan tidak menutup kemungkinan perempuanpun menjadi alat eksploitasi politik baik itu oleh partai-partai politik dan juga kelompok-kelompok kepentingan lainnya.

Keran kebebasan dan kesetaraan yang dikampanyekan oleh orang-orang pro demokrasi dan aktor-aktor politik yang menjadi pemeran utama dalam panggung politik Indonesia terkadang hanya jargon-

jargon saja tidak diimbangi dengan fakta-fakta dilapangan, bahwasanya isu kesetaraan masih menjadi pekerjaan rumah yang teramat besar bagi sistem politik di Indonesia, tugas pemberdayaan politik perempuan masih “hangat-hangat tai ayam” dan secara kasat mata masih sumir terlihat.

Kondisi partisipasi politik perempuan di Indonesia secara umum masih sangat rendah dan ditunjang sangat lambannya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana pentingnya peranan partisipasi perempuan dalam politik, kondisi ini menyebabkan betapa dominannya politik dikuasai oleh kaum laki-laki sehingga keberpihakan terhadap perempuan sering kali terhambat dan juga tidak disertai dengan gerakan perempuan untuk berubah secara alamiah dan progresif.

Kesadaran untuk mengambil hak mereka dalam *affirmative action* sering kali menjadi persoalan baik dalam ranah politik secara nasional maupun lokal, hal ini menjadi sebuah hambatan sekaligus tantangan bagi politik perempuan untuk menempatkan posisi mereka duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kolega mereka kaum laki-laki,

Mengikut Pary G, Moyser G dan Day N (1992: 3) menyatakan partisipasi politik adalah bentuk keikutsertaan dalam proses formulasi, pengesahan dan

pelaksanaan kebijakan. Bentuk nyata partisipasi ini adalah keterwakilan perempuan baik di legislatif maupun di eksekutif, sehingga peran serta perempuan lebih terwakilkan dan juga partisipasi perempuan dalam politik lebih menonjol dan tidak termarginalkan, sehingga ada sinergi antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dan tidak ada diskriminasi gender.

Dalam konteks partisipasi politik perempuan, diperlukan kesadaran yang mendalam tentang betapa pentingnya perempuan untuk menentukan arah kebijakan politik pada kekuasaan, ini diperlukan untuk menyeimbangkan kebijakan yang pro terhadap perempuan, dan tidak melulu berbasis kepada budaya patriarki, dimana hirarki tertinggi adalah dominan laki-laki, sehingga arah kebijakan (*public policy*) hanya menguntungkan laki-laki saja.

Pentingnya partisipasi politik bagi perempuan disebabkan persoalan partisipasi sangat berkaitan dengan masalah-masalah lain. Menurut MacKinnon bahwa ketika hak politik terenggut maka hak-hak lainnya akan mengikuti (terenggut pula). Politik adalah ranah yang sangat fundamental bagi pemenuhan hak-hak lainnya. Hal ini mengingatkan kita akan pendapat politik yang mengatakan bahwa kekejaman politik adalah kekejaman yang paling

menyengsarakan perempuan karena implikasinya adalah menggilas hak-hak perempuan dibidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan bentuk aktifitas-aktifitas lainnya.

Pada masa reformasi keterlibatan perempuan dalam politik mengalami peningkatan secara bertahap dan signifikan, perempuan telah diberikan peluang dan ruang untuk bersaing dalam kontestasi politik era demokrasi yang lebih terbuka dengan koleganya kaum laki-laki dalam perannya di partai politik dan pemilu sehingga diperlukan sebuah aturan khusus untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan baik di parlemen ataupun ekstra parlemen.

Secara umumnya undang-undang tentang keterwakilan perempuan telah dilakukan melalui sebuah terobosan hukum seperti UU No. 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat 1 tentang keterwakilan perempuan oleh partai politik dalam pemilihan umum. Menunjukkan ada niatan baik dari pemerintah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam politik walaupun pada awal terbitnya UU tersebut keterwakilan perempuan dalam parlemen pada 2004 tidak begitu menggembirakan bagi kelompok perempuan karena pada kenyataannya partai politik tetap lebih menjamin supremasi laki-laki dalam konteks persaingan politik di partai politik dan pemilihan umum.

Pada tahun 2008 terbitlah Undang-undang No 10 tentang Pemilihan Umum anggota legislative pada pasal 53 yang mensyaratkan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislative dan sebelumnya pada 6 Desember 2007 di sahkan Undang-undang No.2 tahun 2008 tentang partai Politik yang menjamin minimum 30 persen keterlibatan perempuan dalam partai politik. Niatan baik undang-undang tersebut di sahkan adalah dengan tujuan agar meningkatkan lagi partisipasi politik dan keterwakilan perempuan dalam pentas politik di Indonesia. Mesti difahami bahawa selama ini keterlibatan perempuan dalam politik tidaklah besar, kebanyakan perempuan menjadi objek politik semata yaitu dalam konteks pemilihan umum perempuan hanya menjadi penonton yang datang berbondong-bondong ketempat pemilihan dan memberikan suara mereka ke pada calon-calon yang kebanyakan laki-laki, memang tidak dapat dihindari bahwa keterlibatan perempuan dalam pemilu mendapat stigma positif ataupun negative , dan tidak dapat dinafikan bahwa tidak banyak perempuan yang memang memiliki kualitas politik yang mumpuni baik sebagai kader politik yang berjuang dari bawah dan kemudian sampai kepada pentas politik kelas tinggi ataupun perempuan-perempuan yang memang berjuang dengan kualitas politik yang

berlevel ‘bintang lima’ sehingga mereka mampu merebut dominasi laki-laki baik di partai politik ataupun di level organisasi nasional lainnya.

Dalam kebanyakan perempuan di parlemen adalah karena pengaruh ‘orang kuat’ di daerahnya baik itu suaminya, bapaknya, kakeknya, pamannya yang kepala daerah ataupun patron-patron politik lokal, bukan karena mereka kuat secara alamiah dalam belantara politik tetapi patron-patron tersebut memberikan pengaruh yang kuat terhadap pencalonan mereka, banyak kita lihat di beberapa daerah yang suaminya adalah bupati atau walikota dan istrinya adalah ketua DPRD atau anggota legislative di daerah tersebut dan ketika masa suaminya berkuasa akan habis mereka kemudian di gadang-gadang untuk menggantikan posisi suami mereka sebagai kepala daerah di daerah tersebut.

Walaupun bagaimanapun keterwakilan perempuan di parlemen cukup menggembirakan banyak juga perempuan-perempuan yang memiliki kualitas mumpuni di pentas politik bukan karena faktor-faktor X tersebut tetapi memang karena mereka memiliki kualitas politik ‘bintang lima’. Kuantitas dan kualitas tersebutlah yang sebetulnya diharapkan dari perempuan sebagai sebuah fenomena politik di Indonesia pasca reformasi. Kualitas diri yang baik tentunya akan memperkuat demokrasi dan politik itu

sendiri dan menguntungkan bagi bangsa dan negara dalam konteks persaingan politik, sehingga anggapan-anggapan miring tentang perempuan dalam politik sedikit demi sedikit mampu di hilangkan dengan positif.

Indikasi meningkatnya keterwakilan perempuan dalam parlemen itu terlihat dari meningkatnya jumlah perempuan di parlemen dari 11.8 persen pada pemilihan umum legislative pada tahun 2004 menjadi 18 persen pada pemilihan umum legislative tahun 2009. Keterwakilan perempuan di parlemen pada 2009 tersebut menjadi bukti bahwa dari tahun ketahun politik menjadi semakin menarik bagi perempuan dan perempuanpun semakin memiliki kesadaran akan posisi politik mereka. Partai politikpun semakin membuka peluang kepada perempuan untuk bersaing secara terbuka dengan koleganya laki-laki dalam kontestasi politik nasional ataupun lokal.

Walaupun pada tahun 2014 keterwakilan perempuan dalam parlemen menurun kembali dari yang semula 18 persen menjadi 17, 3 persen, padahal kandidat perempuan yang mencalonkan diri dan masuk dalam daftar pemilih dari partai politik mengalami peningkatan dari 33, 6 persen tahun 2009 menjadi 37 persen pada tahun 2014 (<http://www.beritasatu.com>). Hal ini tentunya berkaitan dengan revisi Undang-

undang No 8 tahun 2012 pemilihan umum dan Undang-undang No.2 tahun 2011 tentang partai politik yang mensyaratkan 30 persen quota pada partai politik yang tertera dalam pasal (5d), dan 30 persen quota perempuan yang menjadi kandidat anggota legislative pada pasal 55. Tentunya revisi tersebut membuat kedudukan perempuan di politik cukup mendapat tempat dan perhitungan yang sangat cermat. Walaupun dalam konteks ini bisa dilakukan di level pusat dan provinsi tapi cukup sukar untuk dilaksanakan pada tataran kabupaten/kota jauh dan terpencil.

Menurut Nuri Soeseno (2014) banyak politisi perempuan yang sebenarnya memiliki kualitas yang sangat baik dalam pentas politik nasional sayangnya perempuan-perempuan dalam politik secara kontekstual mendapat 'cibiran' atau pandangan miring tentang kiprah dan peranan mereka ini bisa dilihat pada pentas pemilihan umum legislative tahun 2014 banyak tokoh-tokoh laki-laki mendapat pujian dan sanjungan positif tentang karakter mereka yang bernilai baik berbanding dengan politisi perempuan yang kecenderungannya mendapat penilaian berbeda dan kebalikan daripada politisi laki-laki. Sungguh pandangan yang bikin masygul karena rakyat memiliki pola pemikiran dan kecenderungan berbeda dalam memandang sesuatu tentunya

dilandasi faktor sosial, budaya dan pendidikan yang berbeda pula.

Sedangkan dalam pentas yang berbeda, peran perempuan di gerakan masyarakat sipil di Indonesia mendapat porsi yang cukup luas, banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan yang tumbuh dan berkembang semenjak reformasi telah membuka perempuan untuk lebih aktif dalam pentas organisasi baik sosial, budaya, ekonomi, hukum dan politik. Kebanyakan organisasi perempuan merupakan organisasi yang bergerak dalam program advokasi dan perlindungan terhadap kaum marjinal ini. Apabila mengikut Neng Dara Afifah (2014) seorang komisioner perempuan Republik Indonesia membeberkan bagaimana tumbuh kembangnya organisasi perempuan terutamanya pasca reformasi yang mampu memberikan warna tersendiri dalam demokrasi Indonesia. Sekedar menyebutkan beberapa organisasi terutamanya KomNas Perempuan yang didirikan pada masa Presiden Habibie menjawab tantangan politik masa transisi pasca Orde Baru.

Pada 1999 hinggalah sekarang tercatat banyaknya organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang yang berbeda baik skala nasional ataupun lokal. Peranan mereka adalah melakukan 'tekanan' kepada pemerintah baik pusat atau daerah untuk membuat aturan kebijakan yang

lebih ramah terhadap perempuan dan tentunya melindungi hak-hak perempuan. Antaranya adalah Komisi nasional Perempuan (1999), kemudian ada Organisasi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA, 2000) organisasi perempuan yang didirikan di Aceh sebagai bentuk kepedulian terhadap perempuan-perempuan yang suaminya menjadi korban konflik, kemudian ada Yayasan Pulih (2002) yang didirikan untuk pemulihan psikologi perempuan akibat dari kekerasan baik dalam rumah tangga, konflik, bencana dan bentuk traumatik lainnya. Selanjutnya ada *Migran Care* organisasi yang peduli terhadap nasib para pekerja yang bekerja di luar negeri dengan membincangkan wacana-wacana global (Neng Dara Afifa 2014).

Apabila dikembangkan lebih luas, sebenarnya peranan perempuan dalam politik tidak saja berada dalam parlemen karena tidak semua perempuan punya peluang untuk menjadi anggota parlemen, karena tidak mudah untuk berada dalam parlemen perlu banyak modal apakah itu modal sosial, modal politik dan modal kapital. Untuk itu kesadaran perempuan dalam politik tidak saja bersaing dalam pemilihan umum untuk menjadi anggota parlemen tapi bagaimana perempuan mampu memberikan warna dan kesadaran politik baik di parlemen ataupun ekstra parlemen, sehingga perempuan

memiliki posisi tawar yang bagus untuk mampu mendorong kebijakan yang pro perempuan dan peduli kepada kedudukan perempuan.

Perempuan dalam politik bisa muncul dalam profesi apa saja baik yang formal ataupun non formal, semua bebas masuk dalam panggung politik dalam partai apa saja, berlatar belakang ideology apa saja sehingga 'perang terbuka' tersebut membuat perempuan mau tidak mau harus siap bertempur dengan modal-modal yang harus dimiliki. Walau bagaimanapun kedudukan perempuan dalam politik era reformasi telah mengalami kemajuan baik secara aturan legal maupun ketertarikan perempuan kepada dunia politik yang selama ini adalah panggungnya laki-laki. Cabaran dari perempuan untuk koleganya tidak bisa dianggap main-main, walaupun bilangan perempuan dalam parlemen agak sedikit turun tetapi sikap politik perempuan untuk mendorong regulasi untuk perempuan tidaklah surut sehingga aturan-aturan politik untuk perempuan lebih bisa mengakomodir kepentingan para perempuan di Indonesia.

Namun demikian, mengikut Luky Sandra Amalia (2010) perjuangan perempuan masih menemui jalan berliku karena hingga saat ini untuk mencapai wilayah publik (lembaga legislatif) harus melalui pintu partai politik sebagai satu-satunya mesin politik di Indonesia.

Padahal, tidak semua partai politik berpihak kepada perempuan. Artinya, dunia politik masih kental dengan budaya maskulinisme. Misalnya, rapat partai dilakukan pada malam hari hingga menjelang subuh. Keadaan ini menyulitkan bagi perempuan, yang secara tradisional terikat dengan beban kewajiban untuk menjaga anak dan melayani suami. Sehingga, hal tersebut menghambat perempuan untuk berperan di bidang politik. Contoh lain, mayoritas perempuan tidak mandiri secara ekonomi, artinya secara finansial masih bergantung kepada suami. Oleh karena itu, perempuan harus seijin suaminya dalam hal membelanjakan uangnya, termasuk untuk membelanjakan uangnya di bidang politik, terkait dengan gerakannya di partai politik. Hal ini berbeda dengan laki-laki yang mayoritas bertindak sebagai pengambil keputusan berkaitan dengan posisinya sebagai kepala rumah tangga.

Saluran politik yang terbatas inilah salah satu yang menjadi hambatan walaupun ada DPD sebagai kamar kedua dalam politik, tetapi memang perempuan harus mampu berjuang dengan keras agar mampu membangkitkan semangat dan peranan perempuan untuk lebih kreatif dan progresif dalam mengejar kualitas dan kuantitas anggota parlemen perempuan. Sangatlah penting bagi perempuan untuk

dapat membuktikan diri walaupun tantangan terasa berat.

Pada masa reformasi keterlibatan perempuan dalam politik mengalami peningkatan secara bertahap dan signifikan, perempuan telah diberikan peluang dan ruang untuk bersaing dalam kontestasi politik era demokrasi yang lebih terbuka dengan koleganya kaum laki-laki dalam perannya di partai politik dan pemilu sehingga diperlukan sebuah aturan khusus untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan baik di parlemen ataupun ekstra parlemen.

Secara umumnya undang-undang tentang keterwakilan perempuan telah dilakukan melalui sebuah terobosan hukum seperti UU No. 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat 1 tentang keterwakilan perempuan oleh partai politik dalam pemilihan umum. Menunjukkan ada niatan baik dari pemerintah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam politik walaupun pada awal terbitnya UU tersebut keterwakilan perempuan dalam parlemen pada 2004 tidak begitu menggembirakan bagi kelompok perempuan karena pada kenyataannya partai politik tetap lebih menjamin supremasi laki-laki dalam konteks persaingan politik di partai politik dan pemilihan umum.

Pada tahun 2008 terbitlah Undang-undang No 10 tentang Pemilihan Umum anggota legislative pada pasal 53 yang

mensyaratkan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislative dan sebelumnya pada 6 Desember 2007 di sahkan Undang-undang No.2 tahun 2008 tentang partai Politik yang menjamin minimum 30 persen keterlibatan perempuan dalam partai politik. Niatan baik undang-undang tersebut di sahkan adalah dengan tujuan agar meningkatkan lagi partisipasi politik dan keterwakilan perempuan dalam pentas politik di Indonesia. Mesti difahami bahawa selama ini keterlibatan perempuan dalam politik tidaklah besar, kebanyakan perempuan menjadi objek politik semata yaitu dalam konteks pemilihan umum perempuan hanya menjadi penonton yang datang berbondong-bondong ketempat pemilihan dan memberikan suara mereka ke pada calon-calon yang kebanyakan laki-laki, memang tidak dapat dihindari bahwa keterlibatan perempuan dalam pemilu mendapat stigma positif ataupun negative, dan tidak dapat dinafikan bahwa tidak banyak perempuan yang memang memiliki kualitas politik yang mumpuni baik sebagai kader politik yang berjuang dari bawah dan kemudian sampai kepada pentas politik kelas tinggi ataupun perempuan-perempuan yang memang berjuang dengan kualitas politik yang berlevel 'bintang lima' sehingga mereka mampu merebut dominasi laki-laki baik di

partai politik ataupun di level organisasi nasional lainnya.

Dalam kebanyakan perempuan di parlemen adalah karena pengaruh 'orang kuat' di daerahnya baik itu suaminya, bapaknya, kakeknya, pamannya yang kepala daerah ataupun patron-patron politik lokal, bukan karena mereka kuat secara alamiah dalam belantara politik tetapi patron-patron tersebut memberikan pengaruh yang kuat terhadap pencalonan mereka, banyak kita lihat di beberapa daerah yang suaminya adalah bupati atau walikota dan istrinya adalah ketua DPRD atau anggota legislative di daerah tersebut dan ketika masa suaminya berkuasa akan habis mereka kemudian di gadang-gadang untuk menggantikan posisi suami mereka sebagai kepala daerah di daerah tersebut.

Walaupun bagaimanapun keterwakilan perempuan di parlemen cukup menggembirakan banyak juga perempuan-perempuan yang memiliki kualitas mumpuni di pentas politik bukan karena faktor-faktor X tersebut tetapi memang karena mereka memiliki kualitas politik 'bintang lima'. Kuantitas dan kualitas tersebutlah yang sebetulnya diharapkan dari perempuan sebagai sebuah fenomena politik di Indonesia pasca reformasi. Kualitas diri yang baik tentunya akan memperkuat demokrasi dan politik itu sendiri dan menguntungkan bagi bangsa dan negara dalam konteks persaingan

politik, sehingga anggapan-anggapan miring tentang perempuan dalam politik sedikit demi sedikit mampu di hilangkan dengan positif.

Indikasi meningkatnya keterwakilan perempuan dalam parlemen itu terlihat dari meningkatnya jumlah perempuan di parlemen dari 11.8 persen pada pemilihan umum legislative pada tahun 2004 menjadi 18 persen pada pemilihan umum legislative tahun 2009. Keterwakilan perempuan di parlemen pada 2009 tersebut menjadi bukti bahwa dari tahun ketahun politik menjadi semakin menarik bagi perempuan dan perempuanpun semakin memiliki kesadaran akan posisi politik mereka. Partai politikpun semakin membuka peluang kepada perempuan untuk bersaing secara terbuka dengan koleganya laki-laki dalam kontestasi politik nasional ataupun lokal.

Walaupun pada tahun 2014 keterwakilan perempuan dalam parlemen menurun kembali dari yang semula 18 persen menjadi 17, 3 persen, padahal kandidat perempuan yang mencalonkan diri dan masuk dalam daftar pemilih dari partai politik mengalami peningkatan dari 33, 6 persen tahun 2009 menjadi 37 persen pada tahun 2014 (<http://www.beritasatu.com>). Hal ini tentunya berkaitan dengan revisi Undang-undang No 8 tahun 2012 pemilihan umum dan Undang-undang No.2 tahun 2011

tentang partai politik yang mensyaratkan 30 persen quota pada partai politik yang tertera dalam pasal (5d), dan 30 persen quota perempuan yang menjadi kandidat anggota legislative pada pasal 55. Tentunya revisi tersebut membuat kedudukan perempuan di politik cukup mendapat tempat dan perhitungan yang sangat cermat. Walaupun dalam konteks ini bisa dilakukan di level pusat dan provinsi tapi cukup sukar untuk dilaksanakan pada tataran kabupaten/kota jauh dan terpencil.

Menurut Nuri Soeseno (2014) banyak politisi perempuan yang sebenarnya memiliki kualitas yang sangat baik dalam pentas politik nasional sayangnya perempuan-perempuan dalam politik secara kontekstual mendapat 'cibiran' atau pandangan miring tentang kiprah dan peranan mereka ini bisa dilihat pada pentas pemilihan umum legislative tahun 2014 banyak tokoh-tokoh laki-laki mendapat pujian dan sanjungan positif tentang karakter mereka yang bernilai baik berbanding dengan politisi perempuan yang kecenderungannya mendapat penilaian berbeda dan kebalikan daripada politisi laki-laki. Sungguh pandangan yang bikin masygul karena rakyat memiliki pola pemikiran dan kecenderungan berbeda dalam memandang sesuatu tentunya dilandasi faktor sosial, budaya dan pendidikan yang berbeda pula.

Sedangkan dalam pentas yang berbeda, peran perempuan di gerakan masyarakat sipil di Indonesia mendapat porsi yang cukup luas, banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan yang tumbuh dan berkembang semenjak reformasi telah membuka perempuan untuk lebih aktif dalam pentas organisasi baik sosial, budaya, ekonomi, hukum dan politik. Kebanyakan organisasi perempuan merupakan organisasi yang bergerak dalam program advokasi dan perlindungan terhadap kaum marjinal ini. Apabila mengikut Neng Dara Afifah (2014) seorang komisioner perempuan Republik Indonesia membeberkan bagaimana tumbuh kembangnya organisasi perempuan terutamanya pasca reformasi yang mampu memberikan warna tersendiri dalam demokrasi Indonesia. Sekedar menyebutkan beberapa organisasi terutamanya KomNas Perempuan yang didirikan pada masa Presiden Habibie menjawab tantangan politik masa transisi pasca Orde Baru.

Pada 1999 hinggalah sekarang tercatat banyaknya organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang yang berbeda baik skala nasional ataupun lokal. Peranan mereka adalah melakukan 'tekanan' kepada pemerintah baik pusat atau daerah untuk membuat aturan kebijakan yang lebih ramah terhadap perempuan dan tentunya melindungi hak-hak perempuan.

Antaranya adalah Komisi nasional Perempuan (1999), kemudian ada Organisasi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA, 2000) organisasi perempuan yang didirikan di Aceh sebagai bentuk kepedulian terhadap perempuan-perempuan yang suaminya menjadi korban konflik, kemudian ada Yayasan Pulih (2002) yang didirikan untuk pemulihan psikologi perempuan akibat dari kekerasan baik dalam rumah tangga, konflik, bencana dan bentuk traumatik lainnya. Selanjutnya ada *Migran Care* organisasi yang peduli terhadap nasib para pekerja yang bekerja di luar negeri dengan membicarakan wacana-wacana global (Neng Dara Afifa 2014).

Apabila di kembangkan lebih luas, sebenarnya peranan perempuan dalam politik tidak saja berada dalam parlemen karena tidak semua perempuan punya peluang untuk menjadi anggota parlemen, karena tidak mudah untuk berada dalam parlemen perlu banyak modal apakah itu modal sosial, modal politik dan modal kapital. Untuk itu kesadaran perempuan dalam politik tidak saja bersaing dalam pemilihan umum untuk menjadi anggota parlemen tapi bagaimana perempuan mampu memberikan warna dan kesadaran politik baik di parlemen ataupun ekstra parlementer, sehingga perempuan memiliki posisi tawar yang bagus untuk mampu mendorong kebijakan yang pro

perempuan dan peduli kepada kedudukan perempuan.

Perempuan dalam politik bisa muncul dalam profesi apa saja baik yang formal ataupun non formal, semua bebas masuk dalam panggung politik dalam partai apa saja, berlatar belakang ideology apa saja sehingga 'perang terbuka' tersebut membuat perempuan mau tidak mau harus siap bertempur dengan modal-modal yang harus dimiliki. Walau bagaimanapun kedudukan perempuan dalam politik era reformasi telah mengalami kemajuan baik secara aturan legal maupun ketertarikan perempuan kepada dunia politik yang selama ini adalah panggungnya laki-laki. Cabaran dari perempuan untuk koleganya tidak bisa dianggap main-main, walaupun bilangan perempuan dalam parlemen agak sedikit turun tetapi sikap politik perempuan untuk mendorong regulasi untuk perempuan tidaklah surut sehingga aturan-aturan politik untuk perempuan lebih bisa mengakomodir kepentingan para perempuan di Indonesia.

Namun demikian, mengikut Luky Sandra Amalia (2010) perjuangan perempuan masih menemui jalan berliku karena hingga saat ini untuk mencapai wilayah publik (lembaga legislatif) harus melalui pintu partai politik sebagai satu-satunya mesin politik di Indonesia. Padahal, tidak semua partai politik berpihak kepada perempuan. Artinya,

dunia politik masih kental dengan budaya maskulinisme. Misalnya, rapat partai dilakukan pada malam hari hingga menjelang subuh. Keadaan ini menyulitkan bagi perempuan, yang secara tradisional terikat dengan beban kewajiban untuk menjaga anak dan melayani suami. Sehingga, hal tersebut menghambat perempuan untuk berperan di bidang politik. Contoh lain, mayoritas perempuan tidak mandiri secara ekonomi, artinya secara finansial masih bergantung kepada suami. Oleh karena itu, perempuan harus seijin suaminya dalam hal membelanjakan uangnya, termasuk untuk membelanjakan uangnya di bidang politik, terkait dengan gerakannya di partai politik. Hal ini berbeda dengan laki-laki yang mayoritas bertindak sebagai pengambil keputusan berkaitan dengan posisinya sebagai kepala rumah tangga.

Saluran politik yang terbatas inilah salah satu yang menjadi hambatan walaupun ada DPD sebagai kamar kedua dalam politik, tetapi memang perempuan harus mampu berjuang dengan keras agar mampu membangkitkan semangat dan peranan perempuan untuk lebih kreatif dan progresif dalam mengejar kualitas dan kuantitas anggota parlemen perempuan. Sangatlah penting bagi perempuan untuk dapat membuktikan diri walaupun tantangan terasa berat.

Faktor-Faktor Penghambat Politik Perempuan

1. Adanya persepsi yang salah dari perempuan bahwa politik itu domainnya laki-laki, dan politik itu penuh dengan kekerasan dan anarkisme dan sesuatu yang kotor. Persepsi ini terpendam dalam pemikiran kebanyakan perempuan-perempuan di Indoensia, apalagi perempuan-perempuan yang tinggal di daerah-daerah yang memiliki akses informasi yang kurang, sehingga doktrin-doktrin politik seperti diatas yang menyatakan bahwa politik adalah wilayah laki-laki dan kotor terbenam dalam pemikiran mereka dan mereka memiliki pemahaman yang salah, dan ini haruslah dirubah dan dipahami oleh para perempuan dimanapun, tidak hanya di kota-kota besar akan tetapi juga di kota-kota kecil dan terpencil.
2. Tidak ada kepercayaan diri yang tinggi dan keberanian dari perempuan untuk bersaing dengan koleganya para laki-laki. Persoalan kepercayaan diri ini merepuakan salah satu faktor yang penting yang menghambat partisipasi politik perempuan di era reformasi. Perempuan merasa inferior dihadapan laki-laki ketika mereka

berlawanan baik secara pemahaman, pemikiran dan juga argumen. Baik dalam keanggotaan partai politik maupun ketika harus bersaing dengan kolega mereka laki-laki dalam mengarungi pemilihan umum baik kepala daerah maupun legislatif.

Kepercayaan diri ini bermula dari kurangnya pengetahuan perempuan dalam politik, pendidikan politik mereka harus segera ditingkatkan.

Pengalaman-pengalaman

berorganisasipun terasa kurang karena kebanyakan perempuan jarang aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi yang banyak menguras waktu mereka baik di organisasi level terbawah maupun atas.

3. Budaya di masyarakat, masyarakat terutama kelompok perempuan masih berfikir soal budaya politik yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin dan budaya patriarki begitu dominannya di Indonesia ini. *Mindset* seperti ini yang kemudian menjadi budaya dimasyarakat Indonesia, bahwa laki-laki adalah pemimpin mereka, perempuan tidak diharuskan untuk menjadi pemimpin walaupun kalau perempuan mampu mereka bisa

menjadi pemimpin. Akan tetapi ketika partisipasi politik perempuan ini aktif tidak mereka akan mampu mengkritisi kepemimpinan kaum laki-laki yang mungkin menyimpang atau menyeleweng dari pakemnya. Sehingga budaya politik yang salah dapt hilang dan memunculkan budaya politik yang baru dan lebih memihak kepada semua elemen masyarakat apakah itu laki-laki ataupun perempuan.

4. Faktor keuangan. Selama ini keuangan dalam sebuah keluarga masih didominasi oleh para laki-laki sehingga masih agak sulit bagi perempuan untuk mendapatkan dana yang sesuai terutama untuk keperluan politik, apakah itu berkontribusi dalam partai politik apalagi harus bersaing dalam pemilihan umum kepala daerah. Perempuan yang tidak mandiri dan terlalu bergantung kepada laki-laki akan membawa persoalan ini, sehingga ketika perempuan mampu mengelola keuangan dengan baik dan mandiri akan membuat perempuan mampu mendanai kehidupan politiknya sendiri.
5. Kualitas, salah satu alasan dan penghambat perempuan untuk bersaing dengan laki-laki adalah

soal kualitas, baik dari segi mental, pendidikan, pengalaman terutama perempuan-perempuan di daerah atau kota-kota kecil, Ini mengindikasikan bahwa sebenarnya kalau perempuan itu mau bersaing dan memiliki kualifikasi yang baik tentunya akan berbanding lurus dengan kualitas yang baik pula, akan tetapi untuk sementara itu hanya terjadi di kota besar saja ataupun di daerah-daerah yang akses politiknya baik, tidak seperti di beberapa kabupaten kota ataupun daerah otonomi baru.

Kesimpulan

Dalam hal partisipasi politik perempuan memang masih kalah dengan laki-laki, sehingga diperlukan solusi dan juga mungkin pemicu bagi perempuan Indonesia untuk lebih bergiat lagi berusaha menyetarakan diri dengan laki-laki dalam konteks politik, karena potensi politik perempuan Indonesia sangat besar sekali hal ini bisa dilihat dari setiap penyelenggaraan pemilihan umum baik pusat ataupun daerah, dimana dari penyelenggaraan tersebut tidak banyak perbedaan yang signifikan dalam hal jumlah pemilih perempuan tapi sangat signifikan ketika dalam kontestasi politik.

Perempuan banyak yang masih tenggelam dalam stigma-stigma negatif

tentang politik dan partisipasi politik itu sendiri, perlu ada motivasi yang besar dari setiap elemen masyarakat untuk memajukan budaya partisipasi politik perempuan ini, sehingga dalam ruang lingkup yang kecil sekalipun perempuan mampu mewujudkan kesetaraan mereka dengan laki-laki. Bahwa perempuan mampu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan laki-laki, dan aktif dalam setiap pengambilan keputusan, apalagi menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perempuan seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi dan sosial, hukum, dan pengambilan kebijakan.

Perempuan harus berani keluar dari zona yang membuat mereka termarginalkan, dogma-dogma yang menyatakan bahwa perempuan hanya urusan kasur, sumur dan dapur harus diubah dan dihilangkan, stigma yang menyatakan bahwa politik adalah wilayah laki-laki, politik adalah keras dan kotor, politik adalah sesuatu yang anarkis haruslah disingkirkan dari pikiran perempuan Indonesia, karena stigma negatif tersebut hanya akan membuat perempuan semakin terpuruk dan tidak berani keluar memperjuangkan hak mereka secara politik.

Ini bisa dilihat dari, masih tidak adanya perempuan yang ikut bersaing dalam pemilihan kepala daerah ataupun legislatif, tidak banyak perempuan yang

terlibat aktif dalam gerakan-gerakan politik dalam rangka mengawal proses politik, sampai terjadinya pengambilan kebijakan, selain hanya sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Rendahnya partisipasi politik perempuan hanya akan menimbulkan kerugian untuk perempuan itu sendiri, karena perempuan tidak mau dan tidak mampu untuk memperjuangkan hak-hak perempuan kearah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A. 1974 *The Study of Comparative Politic*. Boston : Little Brown & Company.
- Almond, Gabriel A dan Sidney Verba. 1963. *The Civic Culture*. New Jersey : Priceton University Press
- Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar – Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo Miriam.1982. *Masalah Kenegaraan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fakih, Mansour. 2002. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press.
- G. Pary, Moyser G dan Day N. *Political Participation and Democati in Britain*. Cambride. The Press Syndicate of The University of Cambride. 1992.
- Gafar, Affan. 1999. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Huntington, Samuel P dan Joan Nelson. *Partisipasi Politik*. Jakarta : Rineka Cipta. 1994.
- Imawan, Riswadha. 1991. *Pemilu Sebagai Mekanisme Demokrasi Politik di Indonesia*. Prospektif No 2 Vol. 3.
- Indar Parawansa, Khofifah.2002. *Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan*. Dapat diakses pada <http://www.idea.int/publications/wip/upload/CS-Indonesia.pdf>
- Kantaprawira, Rusadi. 1988. *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*. Bandung :Sinar Baru
- Koentjaraningrat. 1980. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lareau, A. and Shultz, J. 1996. *Journey Throught Etnography : Realistic account of Fieldwork*. Boulder, Colo: Westview Press.
- Luky Sandra Amalia. 2010. Kiprah Perempuan di Ranah Politik dari masa ke masa. Di unduh dari <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/296-kiprah-perempuan-di-ranah-politik-dari-masa-ke-masa>
- Marbun, B.N. 2005. *Kamus Politik*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Mas'oe'd, Michael dan Philliph Altoff. 1989. *Perbandingan Sistem politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada Press.
- Mackinnon, Catherine A. 1989. *Toward a Feminist Theory of The State*. Harvard: Harvard University Press.

Naqiyah, Najlah. 2005. *Otonomi Perempuan*. Malang: Bayumedia Publishing.

Neng Dara Afifa. 2014. Gerakan Perempuan di Era Reformasi : Capaian dan tantangan. Tulisan untuk hari Kartini 2014. Di unduh dari https://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/04/GERAKAN-PEREMPUAN-DI-ERA-REFORMASI_Neng-Dara-Affiah-21-April-2014.pdf

Nurhidayah.2012. *Partisipasi Politik Anggota Legislatif Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan*. Journal of Education Social Studies. JESS (1) (1) (2012) dapat diakses di <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>

Nuri Soeseno. 2014. *Female politician in political parties of 2014 election : Descriptive Representation vs Substantive Representation*. Dalam 'Indonesia Female Journal. Vol 2. No. 2. Agustus 2014. Hal : 4-31.

<http://www.beritasatu.com/nasional/210327-kuota-30-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-gagal-tercapai.html>

Peraturan Lengkap Pilkada.2006. Jakarta : Sinar Grafika.

Rush, Michael dan Phillip Altoff. 1986. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Utama.

Undang – Undang Otonomi Daerah Terbaru. 2005. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Zainuri, M. 2007. *Partisipasi Politik Perempuan (Perspektif Tradisi Islam Lokal Kudus)*, Tesis Magister Ilmu Politik Pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang: Universitas Diponegoro

Sumber Internet

<http://psychemate.blogspot.com/2007/12/teori-gender.html>

www.asiandevbank.org

www.rahima.or.id